

POLICY BRIEF

JALUR JATIM

Jaminan Akses Layanan untuk Transisi Lulusan Jawa Timur

Penguatan tata kelola transisi SMA/SMK menuju kerja,
studi lanjut, atau wirausaha yang terverifikasi



Policy brief berbasis laporan riset kebijakan
Kompetisi Policy Innovation (POIN) Tahun 2026

Penyusun: Dr. Aman Suryaman, A.P., M.M.
NIP 19751206 199412 1 001

JALUR POIN

Penguatan SDM

KONTEKS

POIN 2026

DATA CUT-OFF

2026

Ringkasan Eksekutif

Keputusan yang diperlukan: mengubah tracer menjadi pintu masuk layanan transisi yang dapat dipertanggungjawabkan.

MASALAH INTI Jawa Timur tidak kekurangan program persiapan kerja. Celahnya adalah belum ditemukannya dalam dokumen yang ditelaah satu standar layanan terpadu yang memastikan data tracer memicu tindakan dan setiap lulusan dikawal sampai outcome-nya terverifikasi.

5,73% TPT lulusan SMK Februari 2026	3,55% TPT umum Februari 2026	63,82% Pekerja informal Mei 2026
---	--	--

Mengapa perlu bertindak sekarang

Pada Februari 2026, TPT lulusan SMK sebesar 5,73 persen, lebih tinggi daripada TPT umum 3,55 persen pada periode yang sama. Pada Mei 2026, 63,82 persen penduduk bekerja berada pada kegiatan informal. Kedua fakta ini tidak membuktikan SMK gagal; keduanya menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengawal transisi dan mengukur kualitas outcome, bukan hanya status bekerja.

Solusi yang diusulkan

JALUR JATIM adalah jaminan akses terhadap asesmen, informasi, pendampingan, rujukan kerja/magang/studi/usaha, dan tindak lanjut berbasis kasus. Sistem yang sudah ada—Dapodik, tracer nasional, E-LSP, BKK, dan layanan ketenagakerjaan—digunakan kembali; inovasinya terletak pada standar layanan, alur lintas OPD, dan akuntabilitas outcome 3/6/12 bulan.

REKOMENDASI Pemprov Jawa Timur menetapkan proyek pilot JALUR JATIM pada kabupaten/kota dan SMK terpilih untuk satu angkatan lulusan, kemudian menggunakan evaluasi independen untuk memutuskan perluasan.

1. Pemilik kebijakan: Pemerintah Provinsi Jawa Timur; pelaksana inti: Dinas Pendidikan dan Disnakertrans.
2. Pengarah/pendukung: Setda, Bappeda, BRIDA, dan Dinas Kominfo; pelaksana lapangan: Cabdin, sekolah, dan BKK.
3. Ukuran sukses: outcome terverifikasi, waktu menuju outcome, kesesuaian bidang, formalitas/perlindungan, pendapatan, retensi, serta pemerataan.

Perubahan tata kelola yang ditawarkan

Dari	Menjadi
Tracer sebagai pelaporan	Tracer sebagai pemicu triase, rujukan, dan pengelolaan kasus.
Kinerja berbasis kegiatan	Kinerja berbasis outcome terverifikasi dan kualitas transisi.
Program dan data berjalan sendiri	Satu standar layanan lintas OPD yang memakai sistem yang sudah ada.

Sumber: Sintesis analisis kebijakan.

Masalah dan Akar Penyebab

TPT rendah tidak otomatis berarti transisi lulusan sehat atau pekerjaan yang diperoleh berkualitas.

1. Sinyal masalah transisi

1. Selisih 2,18 poin persentase antara TPT SMK dan TPT umum pada Februari 2026 menunjukkan lulusan SMK menghadapi hambatan penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata angkatan kerja.
2. TPT menghitung penganggur sebagai bagian dari angkatan kerja; siswa yang melanjutkan studi penuh dan tidak mencari kerja tidak masuk sebagai penganggur.
3. Angka informal Mei 2026 memberi konteks kualitas pekerjaan, tetapi tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa seluruh pekerjaan informal buruk atau tidak layak.

CARA MEMBACA DATA Jika terdapat 1.000 lulusan SMK yang masuk angkatan kerja, TPT 5,73 persen setara sekitar 57 orang menganggur. Pada TPT umum 3,55 persen, sekitar 36 dari setiap 1.000 orang angkatan kerja menganggur. Perbandingan ini adalah sinyal, bukan penjelasan sebab-akibat.

2. Akar masalah yang dapat dibuktikan

Temuan	Bukti	Implikasi kebijakan
Tracer belum optimal	Renstra Disdik menyatakan tracer SMA/SMK/PK-PLK belum optimal.	Data belum konsisten memicu tindak lanjut individual.
Instrumen tersedia	Pergub 38/2024 mengatur BKK, tracer, informasi pasar kerja, dan pemetaan kebutuhan tenaga kerja.	Tidak perlu memulai dari aplikasi baru.
Ukuran hasil belum utuh	Dokumen/program lebih mudah melaporkan peserta, kegiatan, atau penempatan.	Outcome 3/6/12 bulan perlu menjadi tanggung jawab bersama.

Sumber: Renstra Dinas Pendidikan 2025–2026; Pergub Jawa Timur 38/2024; analisis penulis.

HIPOTESIS KEBIJAKAN Jika identifikasi dini, rujukan, tracer, dan tindak lanjut lintas sekolah–BKK–Disdik–Disnakertrans diintegrasikan, lulusan tanpa outcome dapat dikenali lebih cepat dan menerima dukungan yang lebih tepat.

3. Kebaruan yang dipertahankan

- 1) Data tracer tidak berhenti pada respons survei, tetapi otomatis menentukan kebutuhan tindak lanjut.
- 2) Satu petugas atau unit memegang tanggung jawab kasus sampai outcome terverifikasi atau batas layanan berakhir.
- 3) Keberhasilan lintas OPD dinilai pada kualitas outcome 3/6/12 bulan, bukan sekadar jumlah peserta dan kegiatan.

Pilihan Kebijakan

Tiga opsi dibandingkan dengan penilaian multikriteria; angka merupakan penilaian awal penulis yang perlu divalidasi.

Opsi	Deskripsi	Kekuatan	Risiko	Skor
A	Optimasi tracer dan BKK per sekolah tanpa arsitektur layanan baru.	Cepat; biaya tambahan rendah.	Fragmentasi dan akuntabilitas outcome tetap.	3,45
B	Membangun aplikasi tracer dan skill passport provinsi.	Visibilitas tinggi.	Duplikasi sistem nasional; beban adopsi dan biaya teknologi.	1,95
C	JALUR JATIM: standar layanan, integrasi sistem, pengelolaan kasus, dan kontrak outcome.	Paling sesuai dengan akar masalah; memanfaatkan investasi yang ada.	Memerlukan koordinasi, petugas, dan perubahan ukuran kinerja.	4,30

Sumber: Penilaian awal MCDA: kesesuaian masalah 25%; outcome 20%; kelayakan 20%; nonduplikasi 15%; biaya 10%; pemerataan 10%.

Uji sensitivitas

Skenario	A	B	C	Peringkat 1
Bobot dasar	3,45	1,95	4,30	C
Kelayakan dan biaya diperberat	3,75	2,00	4,00	C
Outcome dan pemerataan diperberat	3,10	2,05	4,40	C

Sumber: Simulasi penulis. Bobot diubah dan dinormalisasi; skor opsi dipertahankan.

PILIH OPSI C Opsi C tetap berada pada peringkat pertama dalam tiga skenario. Ini memperkuat alasan memilih pilot, tetapi belum menggantikan validasi biaya, kapasitas pelaksana, dan masukan pemangku kepentingan.

Mengapa bukan aplikasi baru?

1. Identitas dan data pendidikan sudah tersedia melalui sistem nasional; duplikasi menambah akun, beban input, dan risiko kualitas data.
2. Celah yang ditemukan adalah tindak lanjut dan akuntabilitas, bukan ketiadaan tempat menyimpan data.
3. Prinsip desain: gunakan kembali sistem yang ada, bangun integrasi minimum, dan ukur outcome yang bermakna.

Desain JALUR JATIM

Jaminan akses layanan, bukan jaminan pasti memperoleh pekerjaan.

DEFINISI JALUR JATIM memastikan siswa tingkat akhir dan alumni memperoleh asesmen, informasi, pendampingan, rujukan, serta tindak lanjut sampai tujuan transisinya terverifikasi atau batas layanan berakhir.

Perjalanan layanan

Waktu	Layanan minimum	Output	Pemilik proses
H-6–H-3	Asesmen kesiapan dan preferensi; rencana transisi.	Profil risiko dan pilihan jalur.	Sekolah/BKK
H-3–Lulus	Portofolio, sertifikasi, paparan industri, informasi studi/usaha.	Kredensial dan daftar pilihan.	Sekolah/LSP/mitra
0–3 bulan	Rujukan kerja, magang, studi, atau inkubasi usaha.	Status rujukan dan hasil seleksi.	BKK/Disnakertrans
Bulan 3	Tracer pertama dan triase.	Outcome awal atau daftar kasus.	Sekolah/Cabdin
Bulan 3–6	Pengelolaan kasus dan rujukan kedua.	Rencana tindakan individual.	Case manager
Bulan 6	Verifikasi kualitas outcome.	Kerja/studi/usaha terverifikasi.	Cabdin/Disnakertrans
Bulan 12	Cek retensi dan umpan balik.	Retensi, pendapatan, kesesuaian.	Disdik/Disnakertrans/B RIDA

Sumber: Rancangan penulis; horizon dan intensitas layanan diuji melalui pilot.

Lima komponen yang wajib ada

1. Pemetaan kesiapan sebelum lulus dan segmentasi risiko.
2. Rencana transisi individual: kerja, magang, studi lanjut, atau wirausaha.
3. Rujukan yang memanfaatkan BKK, Disnakertrans, industri, kampus, dan inkubator.
4. Pengelolaan kasus bagi lulusan tanpa outcome atau kelompok rentan.
5. Dashboard agregat untuk response rate, outcome, kualitas, dan kesenjangan; data pribadi dibatasi berdasarkan peran.

Intensitas layanan menurut kebutuhan

Tingkat	Sasaran dan bentuk dukungan
Universal	Semua siswa/alumni: informasi, asesmen, rencana transisi, dan akses tracer.
Terarah	Lulusan berisiko: bimbingan, portofolio, sertifikasi tambahan, job matching, atau rujukan studi/usaha.
Intensif	Lulusan tanpa outcome/kelompok rentan: pengelola kasus, rujukan ulang, dan eskalasi hambatan.

Implementasi, Ukuran Sukses, dan Sumber

Mulai kecil, ukur satu angkatan lulusan, lalu perluas hanya jika hasil dan kapasitasnya terbukti.

Pembagian peran

Aktor	Tanggung jawab utama
Disdik	Pemilik standar layanan pendidikan; kualitas data sekolah; pembinaan Cabdin, sekolah, dan BKK.
Disnakertrans	Informasi pasar kerja, pelatihan, rujukan lowongan, dan verifikasi outcome kerja.
Setda/Bappeda	Mandat lintas OPD, kontrak kinerja, integrasi program, dan penganggaran.
BRIDA/Kominfo	Desain evaluasi, tata kelola data, interoperabilitas, keamanan, dan dashboard agregat.
Sekolah/BKK/Cabdin	Kontak alumni, triase, pengelolaan kasus, dan eskalasi hambatan.
KADIN/DUDI/kampus	Lowongan, magang, validasi kompetensi, studi lanjut, dan umpan balik kebutuhan.

Sumber: Rancangan tata kelola penulis; penetapan final memerlukan keputusan Pemprov.

Tahap pelaksanaan

- 0–100 hari: tetapkan tim, standar layanan, definisi outcome, data minimum, perjanjian pertukaran data, dan kriteria lokasi proyek pilot.
- Sebelum angkatan tersebut lulus: pilih lokasi, petugas pengelola kasus, baseline tracer, dan kapasitas BKK; latih pelaksana.
- Satu angkatan lulusan: jalankan layanan 3/6/12 bulan dan audit sampel verifikasi.
- Setelah bulan ke-12: BRIDA mengevaluasi dampak, biaya, pemerataan, beban sekolah, dan kelayakan perluasan.

Indikator keputusan perluasan: response rate; outcome terverifikasi; waktu menuju outcome; kesesuaian bidang; formalitas/perindungan; pendapatan; retensi; biaya per outcome; dan kesenjangan antarkelompok/wilayah.

BATAS KEPUTUSAN Target dampak numerik tidak boleh ditetapkan secara arbitrer sebelum baseline tracer pilot tersedia. Pilot harus memiliki pembanding yang layak, dokumentasi biaya, dan evaluasi independen sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perencanaan Strategi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi.
- Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2025–2026
- <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2026/08/05/1582/jumlah-angkatan-kerja-di-jawa-timur-pada-mei-2026-mencapai-25-32-juta-orang-.html>
- <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2026/05/05/1564/jumlah-angkatan-kerja-di-jawa-timur-pada-februari-2026-mencapai-25-14-juta-orang-.html>
- <https://mail.bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id/tingkat-pengangguran-terbuka-jatim-per-februari-2026-turun-jadi-3-55-persen-gubernur-khofifah-bukti-ekonomi-tumbuh-inklusif-transformasi-pekerjaan-formal-harus-dipercepat>.